

OPEN GOVERNMENT PARTNERSHIP LOCAL: INOVASI DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT



Kabupaten Sumbawa Barat (27/4) – Sekretariat Nasional Open Government Indonesia bersama dengan Direktur Aparatur Negara dan Transformasi Birokrasi (ANTB) Kementerian PPN/Bappenas melaksanakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi terhadap implementasi Rencana Aksi Daerah Kabupaten Sumbawa Barat yang melaksanakan 6 (enam) komitmen, yakni Satu Data KSB, Penguatan Forum Pelayanan Inklusif Setara Andalan (YASINAN). Posyandu Gotong Royong, Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Gotong Royong, Penataan Organisasi Perangkat Daerah, dan Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong (PDPGR).

West Sumbawa Regency (27/4) - The National Secretariat of Open Government Indonesia together with the Director of State Apparatus and Bureaucratic Transformation of the Ministry of PPN/Bappenas carried out Monitoring and Evaluation activities on the implementation of the West Sumbawa Regency Regional Action Plan which implemented six commitments, namely One Data KSB, Strengthening the Setara Andalan Inclusive Service Forum (YASINAN). Gotong Royong Posyandu, Gotong Royong-Based Community Empowerment, Structuring Regional Apparatus Organizations, and Regional Program for Gotong Royong Empowerment (PDPGR).

Dalam kunjungan yang dilaksanakan pada bulan Juli 2023, monitoring dan evaluasi dilakukan pada aksi Revitalisasi Posyandu Gotong Royong dan Forum YASINAN. Pada program revitalisasi posyandu menjadi posyandu gotong royong, Tim Setnas OGI bersama dengan Direktur ANTB didampingi oleh tim pemerintah daerah Kabupaten Sumbawa Barat mengunjungi Posyandu Gotong Royong Mawar Putih 1 di Desa Kalimantan, Kecamatan Brang Ene. Sampai dengan tahun 2020 terdapat 225 posyandu di Sumbawa Barat yang sebagian besar baru menyediakan layanan berkaitan dengan kesehatan, sementara itu posyandu sebagai pos layanan terpadu semestinya dapat menjangkau lebih dari layanan kesehatan saja. Posyandu gotong royong hadir sebagai pusat pelayanan, pemberdayaan, dan pembangunan pada tingkat komunitas.

Hingga Juli 2023, telah terdapat 228 Posyandu Gotong Royong yang tersebar di 64 Desa/Kelurahan dengan 684 Agen Gotong Royong yang akan mengumpulkan data kesehatan dan kependudukan. Agen tersebut terbagi ke dalam agen pelayanan, agen pemberdayaan, dan agen pembangunan. Agen pelayanan bertugas menggerakkan masyarakat mendapatkan pelayanan posyandu dan melakukan strategi advokasi serta edukasi kepada masyarakat. Agen pemberdayaan bertugas mendukung keberjalanan program dan menggerakkan masyarakat supaya aktif. Agen pembangunan bertugas melakukan pendataan terhadap berbagai permasalahan.

During the visit in July 2023, monitoring and evaluation was carried out on the Revitalization of Posyandu Gotong Royong and YASINAN Forum. In the posyandu revitalization program into a gotong royong posyandu, the OGI National Secretariat Team together with the ANTB Director accompanied by the West Sumbawa Regency local government team visited Posyandu Gotong Royong Mawar Putih 1 in Kalimantan Village, Brang Ene District. As of 2020, there were 225 Posyandu in West Sumbawa, most of which only provide health-related services, while Posyandu as an integrated service post should be able to reach more than just health services. Posyandu gotong royong is present as a center of service, empowerment, and development at the community level.

As of July 2023, there are 228 Gotong Royong Posyandu spread across 64 villages with 684 Gotong Royong Agents who will collect health and population data. The agents are divided into service agents, empowerment agents, and development agents. Service agents are tasked with mobilizing the community to get posyandu services and conduct advocacy and education strategies to the community. Empowerment agents are tasked with supporting the program and mobilizing the community to be active. Development agents are tasked with collecting data on various problems.

Program yang dikunjungi selanjutnya ialah Forum YASINAN (Pelayanan Inklusif, Setara, Andalan) yang menjadi media pengaduan dan penyelesaian masalah bersama yang disampaikan oleh Agen Gotong Royong ataupun masyarakat awam. Forum YASINAN telah rutin dilaksanakan setiap malam Jumat sejak tahun 2016. Alur pelaksanaan Forum YASINAN diawali dengan dilakukannya ibadah sholat bersama dan kemudian masyarakat bisa menyampaikan segala permasalahannya kepada para petinggi perangkat daerah, mulai dari Bupati, Sekretaris Daerah, Kepala Perangkat Daerah, Ketua Pengadilan Negeri, dan lain sebagainya. Pihak-pihak tersebut akan secara langsung hadir dan mendengarkan permasalahan para warga untuk pada akhirnya akan diselesaikan.

Sejak dilaksanakan pada tahun 2016, hingga Juli 2023, terhimpun lebih dari 2300 aduan yang meliputi berbagai bidang. Forum YASINAN sendiri nantinya akan diintegrasikan dengan SP4N-LAPOR! dimana nantinya setiap AGR yang mendapatkan aduan akan memasukkan aduan tersebut ke SP4N-LAPOR, kemudian tindak lanjutnya juga akan diupdate pada laman SP4N-LAPOR. Sampai saat ini, 85% aduan telah ditindaklanjuti dan 15% sisanya merupakan aduan yang bukan menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat namun tetap akan dikoordinasikan dengan Pemerintah Provinsi dan instansi vertikal yang bersangkutan.

The next program visited was the YASINAN Forum (Inclusive, Equal, Mainstay Services) which is a medium for complaints and joint problem solving submitted by Gotong Royong Agents or ordinary people. The YASINAN Forum has been routinely held every Friday night since 2016. The flow of the YASINAN Forum begins with a joint prayer service and then the community can convey all their problems to the regional officials, starting from the Regent, Regional Secretary, Head of Regional Apparatus, Head of the District Court, and so on. These parties will be directly present and listen to the problems of the residents to eventually be resolved.

Since its implementation in 2016, until July 2023, more than 2300 complaints have been collected covering various fields. The YASINAN forum itself will later be integrated with SP4N-LAPOR! where later every AGR who gets a complaint will enter the complaint into SP4N-LAPOR, then the follow-up will also be updated on the SP4N-LAPOR page. To date, 85% of complaints have been followed up and the remaining 15% are complaints that are not the authority of the West Sumbawa Regency Government but will still be coordinated with the Provincial Government and the vertical agencies concerned.